

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kerja sama Internasional sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh semua negara dalam menjalin hubungan untuk memenuhi kepentingan negaranya. Kerja sama Internasional yang umum diketahui hanyalah sebatas antara negara dengan negara. Namun, ada pula kerja sama yang dilakukan oleh daerah atau kota di suatu negara dengan kota di negara lainnya (sub-state), yang biasa disebut dengan *Sister City*. Semakin majunya dunia, menyebabkan negara – negara juga semakin melebarkan sayapnya dalam melakukan kerja sama dengan negara lain. Bahkan, pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk melakukan sendiri hubungan diplomasinya dengan negara lain.

Dalam pelaksanaannya Kerja sama internasional dan kerja sama *Sister City* merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi keduanya bisa saling terkait dan saling mendukung. Kerja sama internasional merujuk pada hubungan kerjasama antara dua atau lebih negara untuk tujuan tertentu, seperti perdagangan, politik, sosial, budaya, atau pendidikan. Kerja sama internasional bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perjanjian bilateral antara dua negara, organisasi internasional multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau kerja sama regional seperti Uni Eropa atau ASEAN.

Sementara itu, kerja sama *Sister City* (kota kembar) adalah bentuk kerja sama yang terjalin antara dua kota dari negara yang berbeda. Dalam kerja sama ini, dua kota tersebut secara resmi menjalin hubungan yang erat, saling berbagi pengetahuan, budaya, dan pengalaman dalam berbagai bidang. Kerja sama *Sister City* sering kali diwujudkan dalam bentuk pertukaran pelajar, pertukaran kebudayaan, pertukaran ekonomi, serta kolaborasi dalam pengembangan lingkungan, pariwisata, dan industri.

Hubungan kerja sama *Sister City* dapat memperdalam pemahaman antara dua budaya, memfasilitasi pertukaran pelajar dan pekerjaan, mempromosikan kegiatan ekonomi, dan memperluas jaringan hubungan internasional. Kerja sama ini dapat membantu membangun kerjasama yang lebih erat antara kota-kota di berbagai negara, dan menciptakan kesempatan baru untuk pertumbuhan dan perkembangan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Kerja sama *Sister City* juga dapat menjadi wadah untuk memecahkan masalah bersama dan mempromosikan perdamaian dunia melalui dialog dan pemahaman lintas budaya. Melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar kota, masyarakat dapat belajar satu sama lain dan memperoleh wawasan baru tentang cara-cara berpikir, bekerja, dan hidup yang berbeda.

Dalam banyak kasus, kerja sama *Sister City* juga dapat melibatkan inisiatif dan proyek bersama antara kedua kota, seperti proyek pembangunan infrastruktur, pertukaran teknologi, atau kolaborasi dalam bidang kebudayaan atau seni. Kerja sama *Sister City* (kota kembar) mengacu pada kemitraan antara dua kota atau lebih di negara yang berbeda. Biasanya, kemitraan ini dibentuk untuk memperkuat hubungan bilateral antara dua komunitas dengan saling mengenal, berbagi pengalaman, dan mendorong pertukaran dalam berbagai bidang seperti budaya, pariwisata, pendidikan, perdagangan, teknologi, dan lainnya.

Kerja sama *Sister City* seringkali melibatkan program pertukaran delegasi, mahasiswa, dan budaya antara dua kota. Kedua kota akan mengadakan kegiatan bersama seperti pertukaran seni dan budaya, festival, pameran, seminar, dan kegiatan lain yang mendorong interaksi dan kerjasama antara komunitas lokal di kedua kota.

Melalui kerja sama *Sister City*, kedua kota dapat saling belajar dan bertukar pengetahuan, praktik terbaik, serta mengembangkan persahabatan jangka panjang. Kerjasama ini juga dapat membantu mempromosikan pariwisata, investasi, dan perdagangan antara kedua kota, serta memperkuat hubungan antara negara mereka secara keseluruhan.

Kerja sama *Sister City* tidak hanya menguntungkan dari segi budaya dan pariwisata, tetapi juga dapat menjadi landasan untuk kolaborasi dalam pengembangan ekonomi, lingkungan, teknologi, pendidikan, dan sektor lainnya. Dengan memperluas jaringan dan kerjasama melalui kerja sama *Sister City*, kedua kota dapat saling mendukung dan mempercepat kemajuan masing-masing melalui pertukaran pengetahuan dan sumber daya.

Bentuk kerja sama *Sister City* ini mulai dikembangkan setelah PD II dan menjadi bentuk kerja sama yang resmi di tahun 1950 an. Dengan resminya bentuk kerja sama ini menjadikannya memiliki protokol yang jelas pula (Sinaga, 2010). Setelah itu, konsep ini banyak digunakan oleh banyak negara. Di Indonesia, konsep ini digunakan setelah berakhirnya era Orde Baru dengan adanya peraturan pemerintah pusat mengenai Otonomi Daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang terus di revisi hingga akhirnya terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 yang memberikan kesempatan pada tiap daerah untuk mengembangkan potensi daerah tersebut tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Otonomi Daerah sendiri adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri daerahnya, salah satu cara untuk mengembangkan potensi ini yaitu dengan melalui jalur kerja sama. Salah satu kerja sama yang dapat dilakukan ini adalah kerja sama dengan pihak luar negeri. Adanya Otonomi Daerah ini sendiri membuat gerbang antar pemerintah lokal atau sub-state untuk bekerja sama lebih terbuka lebar. Salah satu program yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini yaitu *Sister City*. Sejak saat itu banyak kota – kota di Indonesia yang melakukan kerja sama *Sister City* dengan kota di negara lain, salah satunya bandung dengan Seoul.

Dalam melakukan kerja sama tentunya ada peran serta Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri. Fungsi keduanya ini diatur dalam Permenlu No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerja sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah dan SK.06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Fungsi kerja dari keduanya bertujuan

untuk membantu, memberikan bimbingan, mensukseskan dan mencegah terjadinya permasalahan dalam kerja sama *Sister City*/provinsi. Namun pada kenyataannya banyak kerja sama *Sister City*/provinsi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah di Indonesia tidak ada manfaatnya, dan tidak ada tindak lanjut kerja sama hingga kerja sama tersebut vakum dan kerja sama tersebut dihentikan.

Pelaksanaan *Sister City* di Kota Bandung pertama kali dilakukan dengan Kota Braunschweig, Jerman. Program ini merupakan program *Sister City* tertua di Indonesia, yang selanjutnya menjadi bentuk respon dari pemerintah pusat mengenai kebijakan untuk mengembangkan potensi daerah di Indonesia sendiri. Sampai saat ini program *Sister City* terdiri dari beberapa kelompok, yakni :

- a. Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri, dan Pariwisata
- b. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi
- c. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga
- d. Bidang-bidang lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

Kerja sama *Sister City* ini terbentuk karena adanya kesamaan karakteristik dari kedua kota. Kesamaan karakteristik ini membuat bentuk dan tujuan kerja sama menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai kerja sama *Sister City* yang terjadi antara kota Bandung – Seoul. Kerja sama *Sister City* antara Bandung dan Seoul adalah kemitraan yang dibangun antara dua kota tersebut untuk memperkuat hubungan bilateral, pertukaran budaya, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata antara keduanya. Kerja sama ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman saling mengenai budaya dan kehidupan masyarakat di kedua kota, serta mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang.

Berikut adalah beberapa aspek kerja sama *Sister City* antara Bandung dan Seoul:

1. Pertukaran Budaya: Program pertukaran budaya melibatkan pertukaran seni, musik, tarian, dan pameran budaya antara kedua kota. Hal ini dapat

melibatkan pertunjukan seni, festival budaya, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya masing-masing.

2. Pendidikan: Kerja sama di bidang pendidikan mencakup pertukaran siswa, guru, dan peneliti antara Bandung dan Seoul. Program pertukaran ini memungkinkan siswa dan pendidik untuk memahami sistem pendidikan, budaya, dan tradisi di kedua kota. Selain itu, kolaborasi penelitian dan program akademik juga dapat terjadi antara institusi pendidikan di kedua kota.
3. Ekonomi: Kerja sama ekonomi bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara Bandung dan Seoul. Melalui pertukaran informasi dan kunjungan bisnis, pelaku usaha di kedua kota dapat menjalin kemitraan dan menjajaki peluang kerja sama di berbagai sektor, seperti industri kreatif, pariwisata, dan teknologi.
4. Pariwisata: Kerja sama pariwisata bertujuan untuk mempromosikan potensi pariwisata masing-masing kota dan meningkatkan kunjungan wisatawan antara Bandung dan Seoul. Pertukaran informasi pariwisata, pengembangan paket perjalanan bersama, dan promosi destinasi wisata adalah beberapa bentuk kerja sama yang dapat dilakukan.
5. Lingkungan Hidup: Kerja sama dalam bidang lingkungan hidup melibatkan pertukaran pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan dan pengurangan dampak perubahan iklim. Kedua kota dapat berbagi praktik terbaik dalam perlindungan lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengembangan energi terbarukan (Bandung B. K., 2017).

Melalui kerja sama *Sister City* ini, Bandung dan Seoul dapat saling mendukung dan memperkaya satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Pertukaran budaya, pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan lingkungan hidup menjadi landasan untuk memperkuat hubungan bilateral yang bermanfaat bagi kedua kota. Seperti yang sudah dijelaskan,

bahwasannya salah satu bidang kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama di bidang ekonomi. Dalam penelirian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kerja sama *Sister City* Bandung – Seoul di bidang ekonomi, khususnya ekonomi perkotaan.

Ekonomi perkotaan telah menjadi kekuatan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia. Dengan populasi kota yang terus bertambah dan urbanisasi yang meningkat, aktivitas ekonomi di perkotaan menjadi semakin dinamis. Pertumbuhan ekonomi perkotaan didorong oleh berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, jasa, dan teknologi.

Salah satu ciri khas ekonomi perkotaan adalah adanya pusat-pusat bisnis yang menjadi tempat berkumpulnya perusahaan, institusi keuangan, dan pelaku pasar. Pusat-pusat bisnis ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha dan meningkatkan daya tarik bagi investasi. Selain itu, keberadaan beragam sektor ekonomi di perkotaan menciptakan peluang kerja yang melimpah, menarik penduduk dari daerah sekitar untuk mencari penghidupan di kota.

Dalam ekonomi perkotaan, pertukaran barang dan jasa berlangsung secara intensif. Aktivitas perdagangan menjadi tulang punggung ekonomi perkotaan, dengan adanya pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan mal-mal modern. Perdagangan ini tidak hanya melibatkan konsumen lokal, tetapi juga menarik wisatawan dan pembeli dari luar kota, sehingga meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, sektor jasa juga memainkan peran penting dalam ekonomi perkotaan. Layanan keuangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan hiburan menjadi sektor yang berkembang pesat di kota-kota besar. Meningkatnya pendapatan per kapita dan gaya hidup yang modern mendorong permintaan terhadap berbagai layanan ini. Dengan adanya sektor jasa yang kuat, ekonomi perkotaan mampu menciptakan lapangan kerja yang beragam dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam ekonomi perkotaan modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan perkotaan, termasuk bisnis, transportasi, dan administrasi pemerintahan. Inovasi teknologi memungkinkan adanya kota pintar (*smart city*), di mana infrastruktur dan layanan kota dikelola secara efisien dan berkelanjutan.

Meskipun ekonomi perkotaan menawarkan banyak peluang dan manfaat, juga terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Pertumbuhan yang cepat dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, krisis perumahan, kesenjangan sosial, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, perencanaan yang baik dan kebijakan yang bijaksana diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi perkotaan berkelanjutan dan inklusif.

Secara singkat dapat dijelaskan, ekonomi perkotaan adalah pilar utama pertumbuhan ekonomi global. Melalui pusat bisnis, perdagangan, sektor jasa, dan teknologi, ekonomi perkotaan menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Namun, tantangan seperti kemacetan dan kesenjangan sosial juga perlu diatasi agar pertumbuhan ekonomi perkotaan berkelanjutan dan inklusif.

Masalah ekonomi perkotaan tentunya dialami oleh banyak kota di Indonesia maupun di belahan dunia. Salah satu kota yang juga mengalami masalah ekonomi perkotaan ini yaitu Kota Bandung. Kota Bandung menghadapi beberapa masalah ekonomi perkotaan yang perlu diatasi. Pengangguran, ketimpangan pendapatan di antara penduduk, keterbatasan infrastruktur, transportasi public yang belum memadai, pertumbuhan bisnis mikro yang kurang berkembang dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menghadapi beberapa masalah terkait kapasitas sumber daya manusia (SDM). Beberapa masalah tersebut antara lain: kurangnya jumlah SDM yang memadai, keterbatasan kualifikasi, tingkat turnover yang tinggi, kurangnya pelatihan dan pengembangan.

Dari penjelasan – penjelasan sebelumnya mengenai masalah ekonomi perkotaan, yang salah satunya terkait tentang kapasitas sumber daya manusia di kota Bandung. Pemerintah kota Bandung memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan Seoul untuk mendukung pengembangan ekonomi perkotaan dari Kota Bandung.

Kerja sama ini diharapkan tidak semata – mata menguntungkan satu belah pihak saja, tetapi ini dilakukan untuk sama - sama mengembangkan potensi dari kota Bandung dan kota Seoul. Pada penelitian ini akan dibahas kerja sama *Sister City* yang dilakukan kota Bandung dengan Seoul. Sebelumnya, kerja sama *Sister City* antara Bandung dengan Korea selatan sudah dimulai di tahun 1997 dengan kota Suwon, dan dilanjutkan di tahun 2016 dengan kota Seoul. Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada tahun 2015. Selanjutnya para konglomerat Korea berdatangan menawarkan kerja sama yang berkaitan dengan *smart city* dan perbaikan infrastruktur, kegiatan ini dijumpai oleh ASEAN-Korea Center. Selanjutnya kerja sama ini diresmikan dan dilaksanakan sesuai kerangka *Sister City* dengan adanya penandatanganan MoU oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Seoul Metropolitan Park Wonsoo yang bertempat di City Hall, Seoul, pada tanggal 7 Oktober 2016, disaksikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Republik Korea John A. Prasetyo. Keduanya sepakat tentang kerja sama ini berisikan poin kerja sama dalam beberapa aspek seperti E-Governance, Kebudayaan, seni dan pariwisata, Ekonomi dan Investasi serta Pertukaran personel dalam jangka pendek.

Implementasi bentuk kerja sama ini hanya dilakukan dari 2016 hingga tahun 2017 saja. Setelah itu, tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai kerja sama yang dilakukan keduanya. Yang menjadi bahasan dalam penelitian kali ini yaitu kerja sama keduanya dalam bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada banyak aspek kerja sama yang dilakukan oleh Bandung dengan Seoul. Salah satunya dalam hal kerja sama di aspek ekonomi. Kerja sama yang dilakukan kedua negara ini dalam aspek ekonomi, khususnya ekonomi perkotaan yaitu dalam

hal upaya pengelolaan pendapatan daerah yang di implementasikan melalui *workshop* dan *short course* bagi karyawan BPPD Bandung dan kerja sama dengan *Tax department seoul* mengenai teknis dan sistem informasi pajak. Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas dari karyawan pemerintah kota Bandung agar lebih siap dalam pelaksanaan perpajakan khususnya dalam pelayanan pajak berbasis digital yang dilakukan seiring dengan berkembangnya teknologi dan pelayanan berbasis digital di era saat ini.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, upaya peningkatan SDM yang dilakukan harapannya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dalam paragraph selanjutnya, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pendapatan daerah dan sumber – sumber pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merujuk pada pemasukan finansial yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah atau unit administrasi lokal. Pendapatan daerah sangat penting dalam membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan di tingkat lokal, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan lain-lain. Sumber-sumber pendapatan daerah bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada kondisi ekonomi, geografis, dan hukum setempat. Berikut adalah beberapa sumber pendapatan daerah yang umum:

1. Pajak Daerah: Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Pajak daerah meliputi pajak properti (pajak bumi dan bangunan), pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta pajak-pajak lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah.
2. Bagian Pendapatan Pusat: Pemerintah daerah mendapatkan bagian dari pendapatan nasional melalui transfer dari pemerintah pusat. Ini termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (DPPAD). Dana-dana ini bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah.

3. **Retribusi Daerah:** Retribusi adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan atau fasilitas publik yang disediakan. Contoh retribusi daerah termasuk retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan sebagainya.
4. **Hasil Usaha BUMD:** Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah daerah. Pendapatan dari BUMD seperti laba atau dividen menjadi sumber pendapatan daerah.
5. **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Pendapatan Asli Daerah adalah pemasukan yang berasal dari sumber-sumber lain di luar transfer pemerintah pusat. Ini termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, serta pemasukan dari perdagangan, jasa, dan sektor ekonomi lainnya.
6. **Pinjaman:** Pemerintah daerah juga dapat mengambil pinjaman dari lembaga keuangan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, pinjaman harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan beban utang yang berlebihan bagi daerah tersebut.

Pendapatan daerah dan sumber-sumbernya dapat bervariasi di setiap negara dan daerah, tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku. Pengelolaan pendapatan daerah yang baik sangat penting untuk menjaga keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menyokong ekonomi perkotaan, juga menjadi salah satu yang akan dibahas di dalam penelirian ini. Pajak sendiri merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan masyarakat ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan atau perbuatan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman dan menurut peraturan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada belasan timbal balik secara langsung melainkan untuk memelihara kesejahteraan umum. Salah satu bentuk pajak sendiri yaitu pajak Daerah. Pajak Daerah sendiri merupakan salah satu pendapatan asli daerah dan

merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan bagi pemerintah daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Kota Bandung sendiri melakukan upaya – upaya dalam penerapan otonomi daerah yang diberikan dalam mengelola pajak daerah. Salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan departemen pajak Seoul dalam bentuk pelatihan dan pengembangan bagi karyawan dan sistem perpajakan BPPD Kota Bandung.

Kondisi pajak di Kota Bandung sebelum dilaksanakannya kerja sama ini terbilang cukup baik, di tahun 2016 sendiri persentasi pajak di tiap bidang terbilang cukup tinggi (Bandung P. , 2018). Namun, masih ada beberapa bidang yang persentase pemenuhan target pemasukan bagi pajak daerahnya kurang dari 90%. Ini bergantung dari banyak aspek salah satunya yaitu sumber daya manusia dari pengelola pajak daerah tersebut sendiri. Aspek yang mempengaruhi kinerja ini salah satunya adalah skill dari sumber daya manusia yang ada masih kurang cakap. Maka dari itu perlu dilakukan kerja sama dalam upaya peningkatan kinerja SDM BPPD Bandung untuk pengelolaan pendapatan Daerah yang lebih baik. Terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia ini di kerja sama *Sister City* Bandung – Seoul dalam ekonomi perkotaan salah satunya menyinggung *capacity building* SDM.

Sumber Daya Manusia yang memadai dan terampil dalam melakukan pekerjaannya khususnya dalam hal ini dalam pelayanan masyarakat kota Bandung harus terus ditingkatkan kapasitas keterampilannya. Hal ini dilakukan agar target dari individu, kelompok dan instansi tercapai maksimal dan meningkat. BPPD tentunya memiliki target realisasi yang harus dipenuhi dari masing – masing divisi yang ada di dalam kerangka organisasi BPPD. Dari sini, sumber daya yang cakap dan kompeten diperlukan agar target dan realisasi pendapatan pajak daerah tersebut dapat meningkat setiap tahunnya. Hal ini digunakan sebagai kesejahteraan masyarakat daerah dengan rencana kota Bandung yang ingin menciptakan Bandung *Smart city* dan peningkatan pada sektor pariwisata kota Bandung.

Penelitian mengenai *Sister City* telah banyak dilakukan sebelumnya. Pertama, ada jurnal yang ditulis oleh Kevin O’Toole (2001), mengenai tipe

kerja sama *Sister City* antara Australia dengan Jepang tentang kebijakan public kota kembar di dua negara tersebut. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Henike Primawanti, dkk (2019), mengenai Kerja sama Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema *Sister City*. Ketiga, ada jurnal penelitian dari Aulia Rahma Hakim (2020), mengenai Dampak Kerja sama *Sister City* Kota Dki Jakarta Dengan Kota Berlin Pada Tahun 2016-2019. Terakhir Jurnal Drs. Nugraha, SE., M.Si., Akt (2019), mengenai pengembangan kapasitas (*Capacity building*) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Selanjutnya akan ada ringkasan penelitian terdahulu mengenai *Sister City* kota Bandung. Pertama ada skripsi dari Syafira Firdayana mengenai Strategi Kota Bandung Dalam Tata Kelola Perkotaan Melalui Kerja sama *Sister City* Bandung-Seoul. Selanjutnya, ada skripsi yang ditulis oleh Diah Rahmi Winatra mengenai Paradiplomasi : Alasan Kota Bandung Melakukan Kerja sama *Sister City* Dengan Kota Namur (Belgia) pada tahun 2017. Lalu, skripsi dari Hana Apriliani mengenai Hubungan Kerja sama Kota Kembar (*Sister City*) Antara Bandung Dan Seoul Tahun 2015-2017. Selanjutnya, ada jurnal dari Randy Bramastya mengenai Kota Bandung Sebagai Subnational Government Dalam Kerja sama *Smart city* Dengan Kota Seoul pada tahun 2016-2019. Sumber bacaan terakhir yaitu skripsi yang ditulis oleh M. Priyudi Ekananda mengenai Dampak Kerja sama *Sister City* Kota Bandung Dengan Kota Suwon (Republik Korea) Dalam Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Terhadap Perkembangan Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kota Bandung pada periode 2008-2013. Selanjutnya ada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurckhalik Djirimu mengenai Peluang Dan Tantangan Kerja sama *Sister City* Kota Baubau-Seoul.

Dari penelitian terdahulu yang ada, penelitian hanya berfokus pada Kerja sama kota Bandung – Seoul di bidang pengembangan Bandung *Smart city* dalam bentuk kerja sama di bidang e-governance dan kerja sama Bandung-Seoul secara umum. Sementara penelitian yang dibahas mengenai kerja sama di bidang ekonomi perkotaan khususnya yang berkenaan dengan

peningkatan kapasitas sdm untuk pengelolaan peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh peneliti belum ada penelitian yang membahas mengenai topik yang di bahas oleh penulis.

Dari penelitian – penelitian tersebut dan bentuk – bentuk kerja sama yang sudah dijabarkan secara singkat penulis menemukan celah untuk meneliti **“Implementasi Kerja sama *Sister City* Bandung – Seoul di Bidang Ekonomi Perkotaan (Studi Kasus Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016 – 2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Sister City sudah dilakukan di kota Bandung dalam waktu yang cukup lama, dan kebanyakan kerja sama yang dilakukan terus berjalan hingga saat ini. Kerja sama *Sister City* yang dilakukan oleh Bandung dengan Seoul ini diketahui hanya berjalan dengan waktu yang cukup singkat yakni di tahun 2016 hingga 2017 saja. Ulasan dari kerja sama keduanya banyak dibahas walaupun kerja sama ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, ada satu bentuk kerja sama yang belum banyak dibahas dari ulasan yang sudah ada sebelumnya. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk penelitian sebagai berikut : **Bagaimana Implementasi Kerja sama *Sister City* Bandung – Seoul di Bidang Ekonomi Perkotaan (Studi Kasus Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016 – 2017)?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membantu pembaca untuk mengetahui mengenai bagaimana kerja sama yang dilakukan Bandung dan Seoul dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia BPPD kota Bandung melalui

program – program yang dilaksanakan dalam rangkaian kerja sama *Sister City* Bandung-Seoul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pendalaman tentang konsep kerja sama *Sister City* terutama yang berkaitan dengan konsep *capacity building*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini harapannya dapat digunakan sebagai rujukan dan informasi untuk mengetahui strategi dan proses kerja sama *Sister City* yang dilakukan oleh Bandung dan Seoul dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPPD kota Bandung.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam beberapa bab dan sub-bab. Sistematika tersebut membagi hasil dari penelitian dalam IV bab, sebagai berikut :

BAB I Bab ini menjelaskan dan menguraikan masalah yang diambil dan menjadi dasar awal mengapa penulis tertarik dengan topik ini. Bab ini juga membatasi dan menjelaskan Pertanyaan, tujuan penelitian, akademis dan praktis, dan manfaat penulisan penelitian yang sistematis.

BAB II berisi tentang kerangka penelitian dan beberapa konsep teoritis untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian.

BAB III akan membahas metode yang akan digunakan penulis saat menulis dan menjawab pertanyaan penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian. Berisi tentang objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan waktu penelitian.

BAB IV Bab ini akan berisikan pembahasan terkait kerja sama *Sister City* yang dilakukan Bandung – Seoul secara garis besar. Akan diuraikan pula secara singkat alasan kedua kota melakukan kerja sama.

BAB V Bab ini akan berisikan mengenai bentuk kerja sama *Sister City* yang dilakukan Bandung dan Seoul melalui program – program yang dilakukan dalam upaya pengelolaan pendapatan daerah bagi kota Bandung. Dalam hal ini peningkatan sumber daya manusia yang berpengaruh bagi pengelolaan kapasitas aparat dan instansi pemerintah.

BAB VI Bab ini merupakan bab penutup dari hasil penelitian ini yang berisikan mengenai kesimpulan dari permasalahan penelitian ini yang merupakan analisis data yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA